PENGARUH SISTEM KEBIJAKAN PERKREDITAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK

(Studi Kasus pada PT. Bank Hana)

*The Effect of Credit Policy System to the Bank's Health Level
(Case Study at PT. Bank Hana)*

Oleh:

Novianti Susanto dan Aming Tirta

¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
e-mail: noviantisusanto@ymail.com

ABSTRACT

Bank has a significant role in economic activities. This led to tighten the inter-bank competition, especially in terms of lending. The credit policy system is one of the important things in banking operations. Credit policy system is a reference for banks in distributing credit to the customers. In addition the credit policy system may also affect the level of health of a bank.

The purpose of this study is to determine how the application of credit policies in PT. Hana Bank influences the level of health. The study was conducted to assess whether the credit policy implemented is in accordance with the provisions regulated by Bank Indonesia. The research was conducted in PT.Hana Bank, a subsidiary of Hana Bank Korea.

The results showed that PT. Hana Bank has a credit policy system which is comprehensive and structured. This system provides references and limitation for PT. Hana Bank's lending activities in order to minimize risks that may arise in lending activities. The rating of PT. Hana Bank is measured by the ratio of CAR, Liquidity Ratio, NPL and the LDR. It shows that PT. Hana Bank is in healthy condition, which can be seen from the CAR ratio that is above 8%, NPL ratio that is below 5% and LDR ratio that is below 110%, which has been set by Bank Indonesia.

Overall performance of PT. Hana Bank is good and the level of health by implementing a credit policy is right on target.

Keywords : credit policy system, bank's health level

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dewasa ini sistem perkreditan yang diterapkan di tiap-tiap Bank semakin beragam. Antara Bank yang satu dengan yang lainnya berbeda, tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri.

Perkreditan merupakan salah satu usaha yang penting bagi dunia perbankan dan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar pula. Namun di balik itu semua ternyata pengelolaan perkreditan mempunyai beberapa masalah yang cukup rumit pula, antara lain :

- a. Pemahaman masing-masing jenis usaha nasabah yang akan dibiayai dengan kredit.
- b. Masalah perkreditan yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan satu debitur lainnya, oleh karena itu pihak perbankan dituntut harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara cepat harus mampu pula melakukan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya.
- c. Penanganan masalah perkreditan cukup kompleks sehingga untuk penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang kompeten.
- d. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan dengan baik diperlukan sejumlah dana pihak ketiga yang biayanya relatif lebih rendah dibanding rata-rata suku bunga kredit.
- e. Proses dari pemberian jasa kredit memerlukan waktu yang relatif panjang.
- f. Proses jangka perkreditan akan selalu dihadapkan pada kemungkinan risiko-risiko masa yang akan datang yang serba tidak pasti.
- g. Kegiatan perkreditan banyak dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah dari waktu ke waktu.

Dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat, sebuah bank akan melakukan kajian

yang mendalam terhadap pihak-pihak ataupun faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit tersebut. Penyusunan rencana perkreditan bank merupakan kegiatan yang cukup rumit, karena banyak faktor atau aspek yang harus diperhitungkan dalam penyusunannya.

Perencanaan bidang perkreditan merupakan dasar dan langkah awal untuk melakukan pengelolaan kredit yang efektif. Perencanaan kredit dapat dirumuskan sebagai suatu proses logis dan penentuan variabel dan peristiwa-peristiwa yang terdokumentasi, baik masa silam, masa sekarang, maupun masa mendatang, yang akan mempengaruhi operasional perkreditan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh sistem kebijakan perkreditan perbankan antara lain adalah mengatasi ketidakpastian perubahan, memfokuskan segmentasi pasar, mencari indikasi mengenai kondisi sektor ekonomi, sebagai instrumen pengawasan internal kredit, menghindari spekulasi dan pelanggaran peraturan perbankan yang berlaku.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Sistem Kebijakan Perkreditan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank. Studi Kasus PT. Bank Hana Cabang Bogor** “

1.2. Identifikasi masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebar lebih jauh, maka penulis merasa perlu untuk melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh Bank?
2. Apa saja risiko-risiko yang muncul dalam penyaluran kredit?
3. Bagaimana pengaruh sistem kebijakan perkreditan terhadap tingkat kesehatan bank?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan pemikiran secara teoritis

2.1.1. Definisi Bank

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Berikut ini beberapa pengertian bank :

1. Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan:

Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.”
3. Verryn Stuart mengatakan dalam bukunya Bank Polilik, yang dikutip oleh Simorangkir dalam bukunya Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (2004,10)

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang giral.

4. Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Pemasaran Perbankan (2004, 8) memberikan pengertian bank sebagai berikut :

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2. Pengertian Kredit

Terdapat beberapa pengertian mengenai kredit, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil (1986,9) dan menurut Hessel Nogi S, Tangkilisan dalam bukunya Mengelola Kredit Berbasis (2003, 33), “Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran”.
2. Walaupun banyak definisi-definisi tentang kredit namun sebagai landasan perbankan di Indonesia yang menyangkut mengenai kredit perbankan akan berpegang kepada definisi terakhir, yaitu menurut Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tentang Perbankan :
Kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. Menurut Drs.Ek.Op Simorangkir dalam bukunya Budi Untung (2005, 2) mengatakan :
Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang yang demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.
4. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab I, pasal 1, 2 Undang-undang

Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, yang merumuskan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

2.1.3. Risiko-risiko Perbankan

Menurut Ir. Ade Arthesa, MM dan Ir. Edia Handiman dalam bukunya Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (2006, 168)

Kriteria risiko mencakup (1) aktivitas pemasaran, dengan penerapan standar minimal nasabah, (2) tanda-tanda peringatan dini atas kondisi keuangan nasabah yang dinilai memburuk, (3) seleksi awal atas permohonan kredit, (4) penyediaan standar penerimaan yang diharapkan dari tiap-tiap nasabah.

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial (1999, 159) menjelaskan mengenai risiko yang dihadapi perbankan yang terbagi kedalam 3 (tiga) kriteria, terdiri atas :

1. Risiko Keuangan (*financial risk*)

Merupakan risiko yang mungkin diderita suatu bank karena pengelolaan keuangan maupun kegiatan operasionalnya yang kurang baik, maka akan mempunyai

dampak negatif pada kondisi keuangan yang bersangkutan. Rasio ini meliputi:

a. *Credit Risk*

Merupakan suatu risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

b. *Liquidity Risk*

Merupakan risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.

c. *Interest Rate Risk*

Merupakan risiko atas interest yang akan diterima dari asset yang dimiliki oleh bank lebih kecil dari interest yang dibayar kepada pemilik bank.

d. *Capital Risk*

Merupakan risiko bank atas penurunan yang terjadi pada assetnya.

2. *Delivery Risk*

Merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan proses kegiatan operasional bank yang bersangkutan didalam menyampaikan produk dan jasa kepada para pelanggannya.

3. *Enviromental risk*

Merupakan risiko yang mungkin diderita suatu bank karena pengaruh situasi masyarakat, sosial, politik, perekonomian, moneter dan fiskal pada waktu bank menjalankan usahanya sehingga mempengaruhi kondisi bank tersebut.

Sementara Suhardjono dalam bukunya Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah (2003, 74) menggunakan pengelompokan risiko berdasarkan rekomendasi BCG (*Boston Consulting Grup*), yaitu:

1. Risiko Kredit

Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah. Diantara risiko-risiko yang terdapat dalam bisnis perbankan, pada umumnya risiko kredit yang paling penting, karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagian nasabah ini dapat mengakibatkan bangkrutnya bank.

2. Risiko Pasar

Merupakan risiko kerugian dalam nilai portofolio yang diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditi dan fluktuasi harga saham.

3. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau proses-proses operasional yang kurang memadai. Antara lain risiko operasional yang berhubungan dengan proses kredit, proses non kredit, aktivitas treasur, kecurangan (*fraud*) dan sebagainya.

Dimana risiko-risiko tersebut mampu mempengaruhi tingkat rentabilitas bank yang bersangkutan

2.1.4. Sistem Kebijakan Perkreditan

Sistem kebijakan perkreditan adalah suatu sistem kebijakan yang dibuat guna untuk mengontrol, menyeleksi, dan mengawasi jalannya kegiatan kredit.

Menurut Modul Kebijakan Perkreditan Bank PT. Bank Hana No. 20/30A/DIR/SK tanggal 31 Oktober 2008, cakupan pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat mencakup :

1. Pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, mencakup :
 - a. Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi

kredit serta prosedur pengawasan kredit.

- b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus
 - c. Perlakuan terhadap kredit bermasalah yang tunggakan bunganya di kapitalisasi (kredit yang diplafonding)
 - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.
 - e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan/atau debitur-debitur besar tertentu, mencakup :
 - a. Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan / atau debitur-debitur besar tertentu dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Pengediaan Modal Minimum (KPM) bank.
 - b. Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan/atau debitur-debitur besar tertentu yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya (*risk sharing*) dengan bank-bank lain.
 - c. Persyaratan kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan/atau debitur-debitur besar tertentu mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitur-debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan.
 - d. Kebijaksanaan dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan/atau debitur-debitur besar tertentu dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dari debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.
4. Kredit yang dihindari seperti :
 - a. Kredit untuk tujuan spekulasi
 - b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank.
 - c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank
 - d. Kredit kepada debitur bermasalah dan/atau macet di bank lain.
 - e. Kredit untuk membiayai transaksi usaha yang melanggar hukum
 - f. Sektor-sektor ekonomi baik secara internal (antara lain : usaha/industry yang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, produk senjata api, usaha terkait perjudian/kasino, produk/perdagangan terkait barang-barang berbahaya/mengandung radio aktif, usaha terkait prostitusi) maupun eksternal (produk perdagangan ilegal di suatu Negara) tergolong *negative list*.
 - g. Kredit kepada perusahaan berjangka besar yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

2.1.5. Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Indah dalam tulisannya yang berjudul Tingkat Kesehatan Bank yang dikutip dari

<http://butuhbelajar.blogspot.com/2011/05/tingkat-kesehatan-bank.html>, (diakses 5 September 2011), pengertian tingkat kesehatan Bank secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam

melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Menurut Ir. Ade Arthesa, MM dan Ir. Edia Handiman dalam bukunya Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (2006, 132), ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank umum adalah :

Kesehatan atau kondisi keuangan/non keuangan bank tertentu merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, serta pihak lainnya. Kondisi bank seperti itu dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.

Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR Tgl 19 Maret 1998, suatu bank dikatakan sehat apabila bebas perselisihan interen, tidak ada campur tangan pihak ekstern, terhindar dari praktek perbankan lain yang dapat membahayakan usaha bank. Selain itu, dalam menilai suatu bank sehat atau tidak, ada alat ukur untuk mengetahui (indikator kesehatan bank), yaitu berupa faktor kualitatif dan faktor kuantitatif. Namun biasanya faktor

yang mudah diukur adalah faktor kuantitatif berupa rasio – rasio keuangan, karena datanya mudah diperoleh. Dengan kata lain bank dikatakan sehat jika indikator kesehatan bank yang dimilikinya lebih baik dari ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang–undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah :

Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan Kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

2.2. Tinjauan pemikiran secara konseptual

Dalam menjalankan proses penyaluran kredit, Bank harus menganut prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem kebijakan perkreditan yang dapat membantu Bank dalam menilai calon debiturnya dan menyalurkan kredit.

Umumnya setiap Bank memiliki sistem kebijakan yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisasi risiko yang mungkin muncul dalam penyaluran kredit.

Diharapkan dengan adanya sistem kebijakan tersebut setiap bank dapat meningkatkan rasio kesehatannya sehingga dapat terus bertahan di dalam persaingan perbankan di Indonesia.

2.3. Premis dan hipotesis penelitian

2.3.1. Premis

1. Bahwa setiap Bank telah memiliki dan menjalankan sistem kebijakan perkreditannya masing-masing.
2. Bahwa dalam setiap kegiatan penyaluran terdapat risiko-risiko yang dapat muncul dan berusaha diminimalisasi oleh Bank dengan menggunakan sistem kebijakan perkreditan.
3. Bahwa sistem kebijakan perkreditan yang diterapkan oleh Bank akan mempengaruhi tingkat kesehatan Bank itu sendiri.

2.3.2. Hipotesis

Bahwa PT. Bank Hana telah menerapkan dan menjalankan sistem kebijakan perkreditan yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan maksimal, dimana dengan telah dilaksanakannya sistem kebijakan perkreditan maka tingkat kesehatan Bank pun akan semakin baik.

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sejarah PT. Bank Hana

PT. Bank Hana berkantor pusat di Wisma Mulia, Lt. 52, Jl. Jend. Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710. Saat ini PT. Bank Hana telah memiliki 24 cabang yang tersebar di daerah Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya dan Salatiga.

PT. Bank Hana yang didirikan pada tanggal 15 Mei 2008 dengan akta pendirian no. 24 tanggal 15 Mei 2008 merupakan anak perusahaan dari salah satu institusi keuangan terbesar di dunia yang berlokasi di Korea yaitu Hana Financial Group. Modal dasar PT. Bank Hana sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) dan modal yang telah dibayar penuh dan disetorkan kepada Bank Indonesia

adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam bentuk saham dari para pemegang saham yang dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini. PT. Bank Hana merupakan hasil akuisisi dari Hana Bank Korea dan bank lokal yaitu PT. Bank Bintang Manunggal.

Hana Bank merupakan salah satu bank terbesar di Korea Selatan, anak perusahaan Hana Financial Group (yang nilai asetnya mencapai USD 125 miliar dan menempati peringkat lembaga keuangan terbesar ke-93 di dunia pada tahun 2008). Hana Bank mempunyai peran penting sebagai mitra finansial berstandar global yang hadir di berbagai belahan dunia seperti di New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan China.

Selain Hana Bank Korea, PT. Bank Hana juga didukung oleh IFC (International Finance Corporation), yang merupakan anak perusahaan World Bank anggota World Bank Group yang bertugas membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara berkembang dengan mendanai investasi sektor swasta, mengerahkan modal pada pasar keuangan internasional, dan memberikan layanan konsultasi bagi kalangan bisnis dan pemerintahan. IFC adalah organisasi yang membantu negara-negara berkembang dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan lingkungan yang lebih baik, dan memberikan layanan konsultasi.

Visi, misi dan tujuan PT. Bank Hana saat ini adalah:

- Visi PT. Bank Hana adalah :
Menjadi Top 40 Bank di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan fokus pembiayaan usaha kecil, menengah dan korporasi.
- Misi PT. Bank Hana adalah :
Memberikan standar pelayanan dan pengelolaan bank yang berorientasi pada kepuasan nasabah, perkembangan pasar, peningkatan kinerja dan atmosfer kinerja yang menyenangkan

3.2. Struktur Organisasi BNI Syariah Bogor

a. Komisaris

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang ada memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sesuai persyaratan *fit and proper test* Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris,

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank / Lembaga keuangan lain dan tidak saling memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan Perundang-undangan / peraturan yang berlaku, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris belum didukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui komite-komite yang dibentuk yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi & nominasi karena belum terbentuk menunggu kelengkapan formasi komisaris independen yang sedang dalam proses persetujuan Bank Indonesia. Namun demikian Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan kewenangannya, seperti Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen dan Persetujuan Atas Rencana Bisnis Bank.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Dewan Komisaris wajib

memiliki minimal 3 (tiga) komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Tugas dan tanggung jawab komite berdasarkan pedoman pelaksanaan GCG, sebagai berikut :

a) Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia; memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pelaksanaan tugas tersebut karena belum terbentuknya Komite Audit dilakukan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Satuan Kerja Audit Intern.

b) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan rekomendasi, melalui : melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pelaksanaan tugas tersebut karena belum terbentuknya Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan pembahasan profil risiko oleh Dewan Komisaris dengan Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi. Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif & pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi adalah: menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan memberikan rekomendasi

mengenai Pihak Independen yang menjadi anggota komite.

b. Direksi

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah anggota Direksi sebelum akuisisi sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah akuisisi direncanakan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) dan 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia. Formasi Direksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk porsi asing dan porsi lokal. Saat ini jumlah Direksi yang telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 4 (empat) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank / lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya dalam mengelola perseroan, antara lain :

- a) memimpin dan mengelola bank dengan merumuskan strategi dan kebijakan dalam rencana bisnis tahunan yang disetujui Dewan Komisaris;
- b) memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha;
- c) menyusun, memelihara dan mengelola harta bank;
- d) menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan internal guna membahas berbagai hal yang memerlukan

pertimbangan maupun membahas strategi lainnya serta mengefektifkan fungsi-fungsi komite yang terdiri dari :

a) Komite Manajemen Risiko

Fungsi Komite Manajemen Risiko adalah guna memastikan bahwa bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi & kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan ke depan.

b) Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi dalam mengelola aset dan kewajiban bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan ketentuan lain yang berlaku. Fokus ALCO adalah untuk memastikan bahwa setiap saat bank mempunyai likuiditas dan modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional.

c) Komite Kredit

Komite Kredit bertugas memberikan persetujuan maupun perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan Direksi dengan memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan sesuai azas-azas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pemikiran yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

d) Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Kredit bertanggung jawab dalam

menentukan kebijakan kredit, strategi kredit dan batasan kredit untuk debitur dan segmen usaha tertentu. Selain itu, komite ini juga memantau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif, kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

e) Komite Pengarah Teknologi dan Informasi

Komite Pengarah Teknologi dan Informasi bertanggung jawab dalam mempertimbangkan sekaligus menentukan kebijakan berkaitan dengan risiko teknologi. Komite ini juga merumuskan perkembangan teknologi informasi dan menetapkan strateginya.

f) Komite Sumber Daya Manusia (SDM)

Komite Sumber Daya Manusia menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan SDM yang meliputi sistem remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem *performance appraisal*, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, kebijakan rotasi dan mutasi antar unit kerja.

c. Satuan Kerja Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan. Satuan kerja ini bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab lainnya adalah implementasi prinsip mengenal nasabah (*know your*

customer) dan aktivitas anti pencucian uang (*anti money laundering*). Kegiatan utama satuan kerja ini adalah : melakukan pengujian dan pemantauan tindak lanjut hasil pengujian; *review* kebijakan; dan penerusan ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait guna memastikan setiap kebijakan dan keputusan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

2. Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan komite audit. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk : membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung; mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

SKAI dalam menjalankan tugasnya independen terhadap satuan kerja operasional, tanpa tekanan dari pihak manapun dalam organisasi. Secara berkala kegiatan SKAI *direview* setiap 3 (tiga) tahun oleh Eksternal Auditor atas efektivitas pelaksanaan kerjanya dan kepatuhan terhadap SPFAIB (Struktur Pelaksanaan Fungsi

Audit Intern Bank Umum).

3. Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan setiap akhir tahun buku melalui mekanisme persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan persetujuan Dewan Komisaris namun belum melalui mekanisme rekomendasi dari komite audit karena belum terbentuk. Penugasan kepada KAP telah memenuhi semua aspek, yaitu : kapasitas Kantor Akuntan Publik; legalitas perjanjian kerja; ruang lingkup audit; struktur profesional akuntan publik; dan komunikasi Bank Indonesia dengan KAP yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut KAP telah bertindak profesional dan independen.

3.3. Produk dan Jasa di PT. Bank Hana

Produk yang di tawarkan di PT. Bank Hana cukup banyak dan bervariasi, diantaranya:

1. Tabungan, terdiri dari :
 - a. Tabungan Hana
 - b. Tabungan Hana Smart
 - c. TabunganKu
 - d. Tabungan *Payroll*
 - e. Tabungan Karyawan
2. Rekening Giro, terdiri dari :
 - a. Giro Rupiah
 - b. Giro USD
3. Deposito, terdiri dari :
 - a. Deposito Rupiah dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
 - b. Deposito USD dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
 - c. DOC (*Deposit on Call*) IDR
4. *Loan* / pinjaman, terdiri dari :
 - a. Pinjaman Modal kerja
 - b. Pinjaman Investasi

- c. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
 - d. KPM (Kredit Pemilikan Mobil)
 - e. Kredit Multiguna
 - f. Pinjaman Karyawan
5. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Sedangkan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Hana kepada nasabahnya antara lain :

1. Transfer / kiriman uang dalam mata uang Rupiah :
 - a. LLG (Lalu Lintas Giral)
 - b. RTGS (*Real-Time Gross Settlement*)
2. Transfer dalam mata uang asing (*outgoing remittance*)
3. Inkaso
4. Kliring
5. Penerimaan pembayaran pajak
6. Bank Garansi
7. L/C (*Letter of Credit*)
8. *Forex*
9. SKBDN (*Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Kebijakan Perkreditan yang Diterapkan oleh PT. Bank Hana

4.1.1. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Dalam upaya menjamin pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian intern, PT. Bank Hana membuat perangkat perkreditan yang disusun sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai mata rantai atau saringan *judgement* yang mengandung suatu *built in control*.

Oleh karena itu, perangkat perkreditan PT. Bank Hana yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, satuan kerja pengkreditan, dan satuan kerja lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses kegiatan perkreditan, juga membentuk Komite kebijaksanaan Perkreditan (KKP) dan Komite

Kredit (KK) yang keanggotaannya ditetapkan secara tertulis oleh Direksi.

a. Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP)

KKP merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberi saran-saran perbaikan.

b. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Di samping keanggotaan KK di atas, dapat dibentuk komite kredit di bawahnya dengan keanggotaan dan batas wewenang memutus kredit yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

c. Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan meliputi :

1. Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
2. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit tersebut.
3. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
4. Menyetujui KPB yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan

Perkreditan Bank (PPKPB) yang ditetapkan Bank Indonesia.

5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.
6. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu dan hal-hal lain yang dilaporkan secara berkala oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

d. Direksi

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan perkreditan meliputi :

1. Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setelah disetujui Dewan Komisaris serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.
2. Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam PPKPB dan sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan KKP.
3. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
5. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh SKAI.
6. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.

7. Menetapkan anggota KKP dan KK sesuai anggaran dasar perseroan serta KK di bawah Direksi sesuai keputusan pendelegasian wewenang oleh Direksi.
8. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan.
 - b) Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepadapihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - c) Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah
 - d) Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB
 - e) Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI
 - f) Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - g) Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

e. Satuan Kerja Perkreditan (SKP)

SKP adalah satuan kerja yang berkaitan langsung dengan proses persetujuan kredit dan satuan kerja penunjang bidang perkreditan/*loan administration* yang dalam kaitan ini setiap pejabat dan pelaksana SKP sekurang-kurangnya wajib :

1. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB.
2. Melaksanakantugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.
3. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan

dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Bank.

4.1.2. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kredit merupakan asset produktif yang menjadi sumber utama pendapatan dan menjamin kelangsungan hidup Bank, namun di sisi lain juga dipengaruhi oleh risiko kredit yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank. Oleh karena itu di dalam kegiatan operasional perkreditan PT. Bank Hana diatur mengenai Kebijakan Persetujuan Kredit yang mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.

4.1.3. Penilaian Agunan

Pada umumnya agunan diberikan dalam setiap pemberian kredit, baik tunai maupun kredit non tunai. Agunan bukan merupakan sumber pelunasan kredit yang utama karena jaminan pokok dari suatu pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dari hasil usaha debitur. Dengan demikian agunan baru dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila debitur mengalami kegagalan usaha

4.1.4. Pengawasan Kredit

a. Monitoring Kredit

1. Status Kredit Lancar

AO/RM harus selalu berinisiatif aktif untuk melakukan *monitoring* usaha dan atau aktifitas rekening debitur serta pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai yang dipersyaratkan

2. Status Kredit Bermasalah

Unit *Loan Administration* melakukan usaha penagihan untuk kredit bermasalah secara efisien dan efektif. Pelaksanaan tetap harus berpedoman pada pola-pola bisnis, sopan, tegas

tetapi taktis (bukan kasar) dan terarah dengan tujuan utama agar tagihan diterima semaksimal mungkin.

b. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan bank yang mengandung berbagai risiko, maka diperlukan penerapan dan pelaksanaan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan kredit diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Dalam kaitan ini, hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern bank yang terkait dalam perkreditannya.
2. Pengawasan kredit juga meliputi pengawasan sehari-hari yaitu oleh manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
3. Pengawasan kredit juga harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan yang dilakukan oleh SKAI.

c. Objek Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang dilaksanakan meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu :

1. Pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan.
2. Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak-pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu harus dilakukan lebih intensif.

4.2. Risiko-risiko yang Muncul Dalam Penyaluran kredit

Risiko-risiko yang mungkin muncul dalam penyaluran kredit antara lain :

- a. Pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tidak lengkapnya data yang disajikan dalam proposal kredit dapat menyebabkan tidak akuratnya pengambilan keputusan pemberian kredit.
- b. Kekurangpahaman atas kebutuhan kredit debitur dapat menyebabkan ketidak efektifan penggunaan kredit.
- c. Ketidapkahaman pemutus kredit atas bidang usaha debitur yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk membiayai debitur.
- d. Perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan perubahan kondisi usaha debitur, sehingga mungkin saja menyebabkan ketidakmampuan debitur dalam membayar dan menyelesaikan kreditnya.
- e. Timbulnya kredit macet.
Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:
 1. Kelalaian bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
 2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada standar yang jelas tentang kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
 3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi;
 4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
 5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
 6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
 7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi

arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Sistem Kebijakan Perkreditan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian terhadap efektif atau tidaknya sistem kebijakan perkreditan yang diterapkan oleh PT. Bank Hana dapat dilihat dalam perhitungan tingkat kesehatannya. Adapun data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari Laporan keuangan Audited per tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2010, dan 31 Desember 2011.

Perhitungan tingkat kesehatan PT. Bank Hana penulis fokuskan pada perhitungan *CAR*, *Liquidity Ratis*, *NPL*, dan *LDR*, yaitu sebagai berikut :

Rasio	2009	2010	2011
CAR	49,23%	29.63%	43.77%
Liquidity	44.72%	34.55%	52.60%
NPL	2.21%	0.58%	0.70%
LDR	55.11%	119.67%	101.41%

Rasio CAR dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 19.60%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 PT. Bank Hana menyalurkan lebih banyak kredit ke masyarakat sehingga menyebabkan ATMR nya pun ikut naik dan menyebabkan rasio CAR menurun. Sedangkan rasio dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 14.14%, hal ini disebabkan karena pada akhir tahun 2011 terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) dari para pemegang saham. Setoran tambahan modal ini masih dimasukkan ke dalam modal yang belum disetorkan dan belum dibukukan ke modal dasar karena belum dilakukan RUPS untuk penambahan modal walaupun dana telah dimasukkan ke dalam kas. Rasio CAR selama tahun 2009 hingga 2011 masih sangat baik

karena rasio ini masih berada di atas rasio minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%.

Rasio likuiditas dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10.17% dikarenakan pada tahun 2010 jumlah simpanan masyarakat di Bank meningkat dan membuat rasio likuiditasnya menurun. Sedangkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 terdapat peningkatan sebesar 18.05% dikarenakan pada tahun 2011 terdapat penambahan modal yang langsung masuk ke dalam kas dan menyebabkan meningkatnya jumlah asset lancar.

Rasio NPL pada tahun 2009 ke tahun 2010 menurun sebesar 1.63%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kredit bermasalah yang telah diselesaikan baik secara musyawarah maupun melalui pelelangan agunan. Selain itu juga kredit yang disalurkan di tahun 2010 cukup besar sehingga membuat jumlah kredit macet yang masih ada semakin kecil porsinya dibandingkan dengan total keseluruhan kredit. Sedangkan rasio NPL pada tahun 2011 naik sebesar 0.12% dibandingkan pada tahun 2010, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kredit bermasalah yang tidak dapat dihindari dan akan berpotensi untuk terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan. Rasio NPL PT. Bank Hana masih sangat baik karena rasio NPL nya masih berada di bawah 5% yang merupakan nilai NPL maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Rasio LDR pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 64.56%, hal ini disebabkan jumlah kredit yang disalurkan lebih besar daripada jumlah simpanan masyarakat yang diterima oleh Bank. Sedangkan pada tahun 2010 ke tahun 2011 terdapat penurunan rasio LDR sebesar 18.26% dikarenakan pada tahun 2011 terdapat peningkatan pada simpanan yang diberikan oleh masyarakat. Idealnya, perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan simpanan masyarakat yang diterima haruslah berimbang sehingga Bank tidak perlu menggunakan dana dari modal

untuk membiayai kredit yang disalurkan. Akan tetapi menurut peraturan Bank Indonesia, rasio LDR ini masih dapat ditolerir dan masih dianggap baik jika tidak melebihi 110%.

KESIMPULAN

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dibuat penulis dari hasil-hasil pembahasan yang diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

PT. Bank Hana telah memiliki sistem kebijakan perkreditannya sendiri yang sangat membantu dalam mengontrol dan mengawasi jalannya kegiatan perkreditannya. Sistem kebijakan perkreditan ini telah dibuat dengan seksama dan mendetail agar dapat memberikan pedoman dan rambu-rambu yang jelas bagi pihak yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan kerancuan.

Syarat-syarat, langkah-langkah, prosedur-prosedur, dan tindakan-tindakan yang harus dipenuhi, dilakukan maupun diambil dalam pengajuan hingga pengawasan suatu kredit sudah amat jelas dan terperinci. Kebijakan ini berjalan seiring sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini segala resiko yang mungkin muncul dalam pemberian kredit dapat lebih diminimalisasi sejak awal.

PT. Bank Hana juga telah membentuk unit-unit khusus seperti Komite Kredit, *Credit Review*, *Appraisal*, *Loan Administration*, Bagian Legal, Satuan Kerja Remedial dan Divisi Audit Internal yang semuanya berdomisili di Kantor Pusat.

Risiko-risiko yang mungkin muncul dalam penyaluran kredit antara lain :

- a. Pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tidak lengkapnya data yang disajikan dalam proposal kredit dapat menyebabkan tidak akuratnya pengambilan keputusan pemberian kredit.
- b. Ketidapahaman atas kebutuhan kredit debitur dapat menyebabkan ketidakefektifan penggunaan kredit.

- c. Ketidapahaman pemutus kredit atas bidang usaha debitur yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk membiayai debitur.
- d. Perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan perubahan kondisi usaha debitur, sehingga mungkin saja menyebabkan ketidakmampuan debitur dalam membayar dan menyelesaikan kreditnya.
- e. Timbulnya kredit macet.
Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:
 1. Kelalaian bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
 2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada standar yang jelas tentang kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
 3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi;
 4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
 5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
 6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
 7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.

Dengan diterapkannya sistem kebijakan perkreditan, diharapkan risiko-risiko di atas dapat diminimalisasi bahkan dihindari.

Pengaruh dari penerapan sistem kebijakan perkreditan adalah tingkat kredit bermasalah yang rendah dimana secara langsung maupun tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap penilaian kesehatan dan tingkat keuntungan Bank.

Penilaian tingkat kesehatan Bank sangat penting dan akan sangat mempengaruhi kinerja

Bank maupun kepercayaan masyarakat di masa yang akan datang. Karena bila sebuah Bank sehat maka masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada Bank tersebut untuk mengelola dana mereka.

Dari rasio tingkat kesehatan PT. Bank Hana sesuai data tanggal 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2011, menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Hana masih sangat baik karena rasioCAR nya masih di atas 8%, rasio NPL nya masih berada di bawah 5% dan rasio LDR nya masih berada di bawah 110% seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pihak manajemen maupun pihak yang berkaitan dalam persetujuan dan pengawasan pemberian kredit masih dapat mengontrol tingkat kredit bermasalah berkat penerapan sistem kebijakan perkreditan sejak awal proses pemberian kredit.

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Unit kerja *Appraisal* dan Internal Audit hanya tersedia di Kantor Pusat. Sebisanya mungkin kedua unit ini juga terdapat tersedia di setiap kantor-kantor cabang dengan pertimbangan agar *Appraisal* dapat memberikan data penilaian yang lebih cepat dan akurat. Sedangkan untuk Internal Audit, jika setiap cabang memiliki Internal Audit sendiri maka tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin karena pemeriksaan dapat dilakukan setiap hari.
- b. Agar Bank dapat memberikan pelatihan kepada bagian-bagian terkait dengan kredit ataupun merekrut karyawan baru yang telah memiliki pengalaman di bidang kredit sehingga proses pemberian kredit dapat lebih maksimal hal dapat mengurangi risiko-risiko kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Ahira, Anne. 2011. Unsur-unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit.
<http://www.anneahira.com/kredit->

[17090.html](#) (diakses tanggal 27 September 2011).

Andrian, Thomas. 2006. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. FE Unila (Diktat Kuliah). Lampung.

Arthesa, Ade Ir, MM dan Ir. Edia Handiman, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.

Bank Indonesia. 2002. *Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002*. Jakarta

Bank Indonesia. 2002. *Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004*. Jakarta

Bank Indonesia. 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2005. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia. 2005. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum*, Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia. 2005. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur*, Bank Indonesia, Jakarta.

Dalimunthe, Zuliani. 2008 *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas 10*, PT. Widya Utama . Jakarta.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003. *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*. <http://www.bi.go.id/bi/web/utama/peraturan/lampiran-se-52203-dpnp.pdf> (diakses 3 Agustus 2011)

Edratna, 2007. *Kebijakan Perkreditan, Merupakan Dasar Pemberian Pinjaman yang Sehat*. www.wordpress.com (diakses 05 September 2011).

Ginting, Ramlan, Dr. S.H., LL.M. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. <http://www.oocities.org/hukum97kredit.pdf> (diakses 3 Agustus 2011)

Hermana, Budi. 2011. *Cara Baru Menilai Kesehatan Bank*.

- <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter>. (diakses 05 September 2011)
- Hernawa Rachmanto, 2006. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Imanda, 2009. *Kebijakan Perkreditan Bank Umum*. <http://suprpto.com> (diakses 05 September 2011)
- Indah, 2011. *Tingkat Kesehatan Bank*. <http://butuhbelajar.blogspot.com> (diakses 05 September 2011)
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kellerman, Dana F. 1971. *The New Grolier Webster International Dictionary*. Grolier Inc. New York.
- Kohler, Eric L. 1964. *A. Dictionary For Accountants 3rd edition*, Prentice Hal – Inc. New York.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1996. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil Edisi Ketiga*. BPFE-YOGYAKARTA : Yogyakarta.
- Prosedur Pembeian Kredit, Manual Perkreditan PT Bank Hana No. 20/19/DIR/SK tanggal 30 September 2008.
- Modul Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PKB) PT. Bank Hana No. 20/30A/DIR/SK tanggal 31 Oktober 2008.
- Nurmawan. 2005. *Uang dan Lembaga Keuangan*. Jurnal keuangan. Jakarta.
- Pratama, Billy Arma, ST. 2010. *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*. <http://eprints.undip.ac.id> (diakses 10 Agustus 2010).
- Putra. 2009. Indikator Kesehatan Bank dan Rasio-rasio Keuangan. <http://putracenter.net/2009/09/23/in-dikator-kesehatan-bank-dan-rasio-rasio-keuangan/> (diakses 22 Agustus 2011).
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank* Edisi Ketiga. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suhardjono. 2003. *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Bank Sentral, Pasal 8 UU No. 3 Thn 2004.
- Undang-Undang Perbankan , Pasal 29 UU No. 10 Thn 1998,
- Pamungkas, H.B. and Iriyadi, I., 2008. Kajian Pengukuran Kinerja dan Penetapan Harga Transfer. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 8(2), pp.86-94.
- Iriyadi, I. and Oktafiyanthi, A., 2007. Pengakuan Pendapatan: Studi Komparasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus pada PT. Bank Jabar Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 7(1), pp.19-22.
- Iriyadi, I., 2004. Peranan Internal Auditor dalam Menunjang Efetifitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian Pada PT. Organ Jaya. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 4(2), pp.67-72.
- Pamungkas, B., 2008. Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Survei Pada Pemerintah Dati II DI Yogyakarta.
- Pamungkas, B., 2005. Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Penerapan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Disertasi UNPAD. Bandung. Tidak Dipublikasikan*.
- Pamungkas, B. and Kusumahdinata, A., 2011. Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Kaitannya Dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah Studi Kasus pada Pusat Penelitian dan Pengembangan

- Tanaman Pangan Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading*, 11(2), pp.082-090.
- Pamungkas, B., 2012. Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading*, 12(1), pp.001-010.
- Djanegara, M.S. and Ivonia, L., 2006. Evaluasi Pengendalian Intern Penjualan Kredit Dalam Meningkatkan Kolektibilitas Piutang pada PT Austindo Nusantara Jaya Finance. *Jurnal Umum*.
- Djanegara, H.M.S. and Danusaputra, Y., 2007. PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN Studi kasus pada PT. Astra Internasional. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 7(2).
- Nuruzzaman, M. and Djanegara, M.S., 2008. PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DAN IMPLEMENTASI K3. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 8(2).
- Djanegara, H.M.S., 2005. Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan: Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 5(1), pp.1-6.
- Rosita, S.I. and Rahman, A., 2011. EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(1), pp.57-64.
- Muktiadji, N. and Oktaria, Y., 2010. Pengaruh Siklus Operasi Terhadap Likuiditas Dan Modal Kerja (Studi Kasus PT Semen Gresik Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk). *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 10(1), pp.20-27.
- Muktiadji, N. and Trisnawati, D., 2008. Analisis Rasio Likuiditas Untuk Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Membiayai Aktivitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 8(1), pp.44-55.